

*

**PENGALAMAN FAKULTAS KEGURUAN DAN
ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TERBUKA
DALAM PENDIDIKAN BERTERUSAN**

oleh

S. Hamid Hasan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Terbuka Indonesia

PENGALAMAN FKIP - UT DALAM PENDIDIKAN BERTERUSAN

S. Hamid Hasan

PENDAHULUAN

Pada tanggal 11 Juni 1984, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan nomor 41 tentang pendirian Universitas Terbuka (UT), dan pada tanggal 4 September tahun yang sama universitas tersebut mulai berjalan dengan mahasiswa angkatan pertamanya. Ini adalah perguruan tinggi negeri ke 45 dan termuda dalam sejarah pendidikan di Indonesia. Dia dua bulan lebih muda dari Institut Seni Indonesia yang didirikan di Yogyakarta. UT juga merupakan perguruan tinggi negeri terakhir karena pemerintah telah berketetapan, dalam waktu yang tidak ditentukan, untuk tidak lagi menambah jumlah perguruan tinggi negeri di Indonesia.

Walaupun termuda, ciri khas utama UT terletak bukan pada usianya. Universitas Terbuka tidak hanya menambah jumlah perguruan tinggi negeri di Indonesia secara kuantitatif. Terpenting adalah, UT memberikan warna lain bagi khazanah perguruan tinggi di Indonesia. Dengan cara belajar jarak jauh, dimana modul menjadi tumpuan utamanya, UT menjadi perguruan tinggi tingkat universitas pertama di Indonesia yang mengelola cara belajar mahasiswa di luar dinding-dinding kelas tradisional seperti yang terjadi di perguruan tinggi umumnya.

Memang harus diakui, bahwa cara belajar jarak jauh bukan merupakan cara yang pertama kali diperkenalkan oleh Universitas Terbuka. Sebelum UT lahir, telah

berkembang Sistem Belajar Jarak Jauh (SBJJ) di beberapa IKIP*. Dan jauh sebelumnya, telah pula ada kursus-kursus tertulis yang dilaksanakan oleh Balai Pendidikan Guru (BPG) yang sekarang namanya diganti menjadi Pusat Penataran Pendidikan Guru Tertulis (PPPGT). Tetapi, kalau SBJJ merupakan salah satu program dari IKIP sebagai lembaga pendidikan tradisional, dan PPPGT tidak menyelenggarakan pendidikan tingkat universitas, UT adalah lembaga perguruan tinggi yang keseluruhan programnya dilaksanakan dengan cara belajar jarak jauh. Hal ini sesuai dengan dasar pertimbangan pendirian UT untuk memanfaatkan perkembangan teknologi pendidikan yang ada.

FKIP DAN PENDIDIKAN BERTERUSAN

Sejak awal berdirinya, UT memiliki 4 fakultas yakni Fakultas Ekonomi (FEKON), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP), dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Berbeda dengan ketiga fakultas lainnya, FKIP adalah fakultas yang mempunyai tugas khusus untuk meningkatkan kualifikasi tenaga kerja yang sudah ada (dalam hal ini guru), sedangkan ketiga fakultas lainnya, dalam hakekatnya, adalah untuk mempersiapkan orang untuk suatu pekerjaan. Dalam pola tugas seperti itu dapat dikatakan bahwa FKIP adalah fakultas yang bertugas mengembangkan program "in service" sedangkan fakultas lainnya bertugas untuk mengembangkan program "pre service". Dengan tugas pokok seperti itu, FKIP hanya menerima mahasiswa yang telah bekerja sebagai guru di lapangan. Sebagai persyaratan mereka harus menunjukkan surat keputusan pengangkatan sebagai guru. Persyaratan ini, persyaratan sudah bekerja, tidak diharuskan oleh fakultas lainnya.

Disamping persyaratan kerja, FKIP mensyaratkan pula bahwa calon mahasiswa baru boleh diterima apabila ia mengambil program studi yang sesuai dengan ijazah terakhir, masing-masing D-1 untuk program D-2 dan D-3 untuk program S-1. Ketiga

fakultas lain tidak memiliki persyaratan seperti itu. Setiap tamatan SMTA dapat diterima sebagai mahasiswa. Dalam konteks ini, program FKIP dapat dilihat sebagai usaha untuk memberikan kesempatan pendidikan dalam mengembangkan profesi keguruannya. Dari sudut ini, program FKIP dapat dianggap sebagai apa yang dikatakan Brookfield (1986:171) sebagai Continuing Professional Education (CPE), suatu bentuk Pendidikan Berterusan yang lebih terbatas.

Suatu hal yang harus diakui bahwa tidak ada kewajiban bagi para guru tersebut untuk melanjutkan studinya ke FKIP-UT. Walaupun pemerintah menetapkan bahwa kualifikasi guru SMTP adalah D-2 dan guru SMTA adalah S-1, mereka yang telah memiliki jenjang pendidikan D-1 sudah dianggap berhak mengajar di SMTP, sedangkan mereka yang telah memiliki jenjang pendidikan D-3 sudah dianggap berwenang mengajar di SMTA. Dengan perkataan lain, walaupun mereka tidak melanjutkan studi untuk mencapai jenjang pendidikan D-2 (untuk guru SMTP) dan S-1 (untuk guru SMTA) kedudukan mereka sebagai guru sudah dianggap memenuhi persyaratan. Artinya, melanjutkan studi ke FKIP-UT bukan merupakan suatu keharusan, paling tidak sampai saat ini. Oleh karena itu dasar sukarela (*voluntary*) seperti yang dikemukakan oleh Campbell (1977:3) sebagai landasan Pendidikan Berterusan terpenuhi oleh program FKIP-UT walaupun harus pula disadari bahwa Brookfield (1986:174) tidak mengharuskan dasar sukarela itu sebagai sesuatu yang mutlak. Dalam bukunya tersebut, Brookfield (1986:174) menulis "it is important to note that the engagement of some participants in CPE is not always voluntarily".

Dalam konteks seperti itu kiranya sukar dibantah bahwa program yang dikelola FKIP-UT adalah bersifat pendidikan berterusan. Program tersebut memberikan kesem-

patan kepada guru untuk terus meningkatkan kemampuan dan kewenangannya untuk memenuhi keperluannya. Memang harus diakui bahwa program FKIP-UT adalah bersifat pendidikan formal, ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi untuk diterima sebagai mahasiswa. Dan nama mahasiswa itu sendiri memberikan kesan seolah-olah karakteristik pendidikan berterusan tidak terpenuhi. Tetapi kalau pendapat yang dikemukakan Lunardi (1986:1) diperhatikan akan jelas bahwa pendidikan berterusan boleh saja memakai bentuk pendidikan formal maupun pendidikan non-formal.

Barangkali pula pemberian gelar kesarjanaan pada jenjang pendidikan S-1 FKIP-UT (Drs.), memberikan karakteristik bahwa program tersebut tidak sepenuhnya dapat dikatakan sebagai program pendidikan berterusan. Tetapi haruslah diingat bahwa FKIP-UT, sebagaimana fakultas lainnya, tidak mewajibkan mahasiswa untuk menempuh ujian, baik ujian semester maupun ujian akhir program untuk mendapatkan kesarjanaan. UT mengharuskan mahasiswanya mendaftar untuk ujian. Artinya, bagi mereka yang tidak mau menempuh ujian (akhir semester ataupun akhir program) tidak akan dikenakan sanksi. Kenyataan seperti ini berbeda dengan apa yang terjadi di perguruan tinggi tradisional dimana setiap mahasiswa wajib menempuh ujian; kalau tidak mereka dapat dinyatakan gugur status kemahasiswaannya. Hanya yang belum dipikirkan pada saat sekarang adalah pemberian sertifikat bagi mereka yang telah menempuh ujian akhir semester tetapi tidak mau menempuh ujian akhir program.

Secara khusus, adanya program baru yang sedang dikembangkan FKIP-UT yaitu diploma untuk Manajemen Persekolahan memperkuat ciri pendidikan berterusan program FKIP-UT. Program ini, yang rencananya ditawarkan mulai tahun akademi 1989-1990, diperuntukkan bagi kepala sekolah dan guru yang berminat. Persyaratan masuk sebagai

mahasiswa adalah mereka yang telah berstatus sebagai kepala sekolah maupun mereka yang belum berstatus sebagai kepala sekolah. Bagi mereka yang telah berstatus sebagai kepala sekolah, program ini tidak memberikan tambahan wewenang apapun kecuali sebagai suatu penambahan pengetahuan teoritik untuk profesi yang sedang mereka tekuni. Untuk mereka yang bukan bertugas sebagai kepala sekolah, program tersebut tidak dapat pula dikatakan sebagai "pre service program" karena setelah selesai mereka tidak berarti harus diangkat sebagai kepala sekolah. Dengan perkataan lain, program tersebut hanyalah akan memberikan sertifikasi bahwa mereka telah memiliki suatu wewenang tambahan.

Apabila di kemudian hari pemerintah mempercayai manfaat dari program Manajemen Persekolahan bukanlah mustahil bahwa kepada mereka yang menjadi kepala sekolah dan guru yang diproyeksikan sebagai kepala sekolah, harus mengambil program Manajemen Persekolahan. Sampai dengan adanya keputusan yang demikian, mereka yang akan mengambil program Manajemen Persekolahan adalah atas dasar sukarela. Dan seperti yang dikemukakan oleh Brookfield, walaupun nantinya program Manajemen Persekolahan itu menjadi program wajib, tidak lagi bersifat sukarela, hakekat pendidikan berterusan dari program tersebut tetap dapat dipertahankan.

Suatu karakteristik penting yang harus diingat ialah semua program FKIP-UT diperuntukkan bagi mereka yang sudah ada dalam "workforce". Lagipula, untuk melakukan studi tersebut mereka tidak perlu, bahkan tidak boleh, meninggalkan pekerjaan yang menjadi tanggungjawab mereka. Kenyataan ini kiranya cukup kuat untuk mengelompokkan program FKIP-UT sebagai program pendidikan berterusan. Karakteristik inilah yang harus diperhitungkan.

LANDASAN PIKIRAN KURIKULUM FKIP-UT

Dalam mengembangkan kurikulumnya, FKIP-UT menggunakan rasional yang tidak banyak berbeda dengan kurikulum pendidikan guru yang dikembangkan di perguruan tinggi konvensional. Status UT sebagai perguruan tinggi negeri dan keterikatannya dengan kesepakatan nasional, menyebabkan FKIP-UT menggunakan rasional pendidikan guru yang sudah diterima oleh lembaga pendidikan guru lainnya. Meskipun demikian, sesuai dengan tujuan yang hendak dicapainya serta adanya perbedaan dalam cara penyampaian, beberapa rasional khusus digunakan pula sebagai tambahan terhadap rasional pendidikan guru yang sudah ada.

Landasan pikiran pertama ialah guru untuk jenjang persekolahan yang lebih rendah cukup memiliki kualifikasi yang lebih rendah pula dibandingkan dengan guru untuk jenjang persekolahan yang lebih tinggi (Hasan, 1979). Konsekuensi dari landasan pikiran ini ialah program pendidikan untuk guru tingkat Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) lebih rendah dibandingkan dengan program untuk guru Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA). Program Diploma 2 (D-2) yang lebih rendah, dikembangkan untuk guru SMTP sedangkan program Sarjana 1 (S-1) yang lebih tinggi diperuntukkan bagi guru SMTA.

Sesuai dengan landasan pikiran pertama ini, pada saat sekarang FKIP-UT telah memiliki 8 program D-2 dan 6 program S-1. Kedelapan program D-2 tersebut ialah program pendidikan:

- * Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
- * Bahasa Indonesia
- * Bahasa Inggris
- * Olahraga & Kesehatan

- * Luar Sekolah
- * Matematika
- * Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
- * Pendidikan Moral Pancasila (PMP).

Sedangkan keenam program S-1 yang telah ada ialah program pendidikan:

- * Bahasa Indonesia
- * Bahasa Inggris
- * Matematika
- * Biologi
- * Fisika
- * Kimia

Landasan pikiran pertama yang membedakan kualifikasi guru berdasarkan jenjang persekolahan dimana guru tersebut mengajar, disadari mengandung banyak kelemahan. Adalah sesuatu yang lebih diinginkan apabila kualifikasi guru untuk semua jenjang persekolahan adalah sama. Sayangnya, lapangan sangat kekurangan guru dan makin rendah jenjang persekolahan makin banyak pula jumlah guru yang diperlukan. Oleh karenanya itu, untuk memenuhi keperluan akan guru tersebut landasan pikiran semacam itu terpaksa digunakan. Meskipun demikian, suatu kenyataan yang harus dikemukakan ialah bahwa FKIP-UT tidaklah menolak seorang guru SMTP untuk melanjutkan studinya pada program S-1 selama persyaratan terpenuhi. Dengan perkataan lain, walaupun ada kriteria kualifikasi yang telah ditetapkan dalam kebijaksanaan nasional, kriteria tersebut tidak secara mutlak menghambat seseorang untuk melanjutkan studi di FKIP-UT.

Landasan pikiran kedua yang digunakan dalam mengembangkan kurikulum FKIP-

UT adalah pendekatan "concurrent teacher education". Landasan pikiran ini percaya bahwa guru yang baik akan terbina melalui proses pendidikan dimana bidang spesialisasi dikaji bersamaan dengan kajian bidang profesionalisasi. Landasan pikiran ini telah mendominasi pendidikan guru di Indonesia sejak tahun 1946. Program studi di Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dikembangkan berdasarkan prinsip ini. Ketika Perguruan Tinggi Pendidikan Guru, yang menjadi cikal bakal IKIP sekarang, didirikan pada tahun 1954, pendekatan "concurrent teacher education" tetap digunakan. Demikian pula landasan pikiran yang digunakan dalam kurikulum IKIP sekarang ini.

Landasan pikiran ketiga yang digunakan berhubungan dengan definisi/pengertian guru itu sendiri. Guru diartikan sebagai seorang sarjana dalam bidang spesialisasinya yang memiliki lisensi untuk mengajar. Landasan pikiran ini tercermin dalam proporsi Satuan Kredit Semester (SKS) antara perkuliahan bidang spesialisasi dengan bidang keguruan dan dalam pemberian sertifikasi. Dalam kurikulum FKIP-UT ditentukan proporsi 70% untuk bidang spesialisasi dan 20% untuk bidang profesi. Yang 10% lagi adalah untuk bidang pendidikan umum seperti Pendidikan Pancasila, Agama, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Alam Dasar, dan Ilmu Budaya Dasar. Tujuan diberikannya pendidikan umum (MKDU) ini adalah untuk pengembangan kepribadian mahasiswa.

Sertifikasi bagi lulusan FKIP-UT, seperti juga dengan tamatan pendidikan guru di perguruan tinggi konvensional, diberikan baik untuk bidang spesialisasi yang telah ditempuhnya maupun lisensi mengajar yang telah dimilikinya. Bagi lulusan program D-2 diberikan Diploma II dan Akta Mengajar II sedangkan bagi lulusan program S-1 diberikan Ijazah S-1 dan Akta Mengajar IV. Berdasarkan perbedaan dalam sertifikasi ini, FKIP-UT juga merencanakan akan membuka kesempatan bagi mereka yang hanya akan mengambil Akta Mengajar saja atau Diploma saja.

Rencana pembukaan program akta dan diploma saja ini sangat penting. Kedua program ini akan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengikuti perkembangan kependidikan yang terjadi. Bagi FKIP-UT sendiri, adanya program akta yang terpisah dengan program diploma ini akan memberikan fleksibilitas kurikulum yang tinggi. Pengembangan kurikulum akan berterusan sesuai dengan perkembangan ilmu pendidikan dan perubahan kurikulum akan terjadi sebagai suatu proses yang alami.

Sesuai dengan tujuan yang diembannya serta karakteristik populasi yang menjadi targetnya, kurikulum pendidikan guru FKIP-UT hanya memiliki program tahun terakhir. Hanya ada program tahun terakhir untuk D-2 dan S-1. Program tahun pertama untuk D-2 dan tahun pertama, kedua serta ketiga untuk S-1 tidak ditawarkan kepada para peminatnya. Secara diagramatik, program tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

D-2

S-1

- = Program yang ada di FKIP-UT
- = Program yang tidak ditawarkan

Dalam keadaan sekarang, sifat program yang demikian menguntungkan dalam pengertian FKIP-UT segera dapat membantu pemerintah meningkatkan kualifikasi guru di lapangan. Masa studi pendek sehingga mereka segera dapat menyelesaikan studi dan bekerja penuh kembali sebagai guru. Tetapi, sudah harus pula dipikirkan untuk mengisi kekosongan program yang ada di bawahnya. Banyaknya guru di lapangan yang memerlukan pendidikan yang lebih tinggi sedangkan kualifikasi mereka sangat rendah sudah harus dipikirkan sejak sekarang. Apabila program tingkat bawah tersebut terisi, fleksibilitas kurikulum menjadi lebih besar.

Hal lain yang harus diingat ialah adanya kenyataan bahwa banyak guru di lapangan yang mendapatkan tugas tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Ada guru yang memiliki latar belakang pendidikan bahasa Indonesia diharuskan mengajar bahasa Inggris, berlatar belakang pendidikan bahasa Indonesia harus mengajar matematika, dan sebagainya. Kekurangan guru untuk mata pelajaran tertentu di sekolah tertentu menempatkan kepala sekolah dalam posisi tidak punya alternatif lain kecuali menugaskan kepada guru tersebut mengajar mata pelajaran yang kekurangan atau tidak ada gurunya sama sekali. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan tim Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS-IKIP Bandung tahun 1986 (Wiriaatmadja, 1986:11) mengenai guru Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa di Kotamadya Bandung, memperlihatkan bahwa 7 dari 22 guru yang ada mempunyai latar belakang pendidikan di luar bidang studi sejarah.

Adanya permintaan ke FKIP-UT juga memperlihatkan bahwa banyak guru yang ingin melanjutkan studinya di bidang pelajaran yang menjadi tugas mereka sekarang. Untuk sementara permintaan tersebut terpaksa tidak dapat dilayani karena program

tingkat bawah yang belum terisi. Oleh karena itu, pengisian program tingkat bawah ini akan memberikan keluasan pelayanan yang juga lebih besar dari FKIP-UT.

PROSEDUR PENGEMBANGAN KURIKULUM FKIP-UT

Pada dasarnya, prosedur pengembangan kurikulum FKIP-UT tidak berbeda dengan prosedur yang digunakan untuk mengembangkan kurikulum di fakultas lain dalam lingkungan UT. Oleh karena itu, gambaran prosedur pengembangan kurikulum FKIP-UT dalam hal ini dapat pula mewakili prosedur pengembangan kurikulum dalam lingkungan UT pada umumnya.

Pada tahap awal, ide untuk suatu program dibicarakan di tingkat fakultas antara dekan dengan pembantu-pembantunya. Ide tersebut dapat saja berasal dari luar lingkungan fakultas, misalnya dari rektor atau pejabat lainnya, bahkan juga dari orang di luar lingkungan UT. Ide yang paling banyak memang datang dari dekan FKIP-UT. Setelah ide tersebut dianggap matang kemudian diusulkan ke tingkat universitas untuk kemudian diteruskan ke Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Hanyalah dengan persetujuan Dirjen Dikti ide tadi dapat dikembangkan terus.

Setelah ada persetujuan, FKIP-UT membuat rencana pengembangan ide tersebut lebih lanjut. Untuk itu dipersiapkan suatu pertemuan diantara pakar yang berhubungan dengan bidang studi kurikulum yang akan dikembangkan. Pakar tersebut berasal dari berbagai perguruan tinggi di luar UT. Pakar yang paling banyak diundang FKIP-UT berasal dari IKIP Jakarta, ITB, dan IKIP Bandung. Dalam pertemuan tersebut, kepada para pakar itu dikemukakan tujuan diadakannya pertemuan serta diberikan kesempatan untuk

mencernakan ide yang dimaksudkan.

Dalam kesempatan pencernaan ide itu, para pakar tadi diberi kesempatan pula mengajukan pendapat dan usul untuk perbaikan terhadap ide yang ada. Pimpinan FKIP-UT menilai pendapat dan usul yang diajukan. Apabila pendapat dan usul tadi dapat menyempurnakan ide yang sudah ada tetapi tidak bertentangan dengan pokok-pokok yang melandasi ide tadi, pendapat dan saran tersebut diterima dan digunakan dalam pengembangan kurikulum. Dengan demikian terbuka proses demokratisasi dalam proses pengembangan kurikulum.

Proses demokratisasi ini dianggap penting. Adanya proses tersebut dianggap menumbuhkan perasaan memiliki (sense of belongings) dari para pakar tersebut terhadap kurikulum yang akan dikembangkan. Mereka merasa bahwa kurikulum itu bukan saja milik FKIP-UT tetapi milik mereka juga. Pernyataan-pernyataan yang dikemukakan para pakar tersebut dalam pembicaraan-pembicaraan di luar sidang memberikan kesan yang kuat akan adanya perasaan memiliki tersebut. Demikian pula sikap yang ditunjukkan para pakar dalam menyelesaikan pekerjaannya. Mereka berusaha memberikan pemikiran terbaik mereka dalam pekerjaan pengembangan kurikulum dan bukan berusaha untuk segera menghindari pekerjaan tersebut.

Dalam pengembangan kurikulum ini para pakar menyelesaikan pekerjaan seperti merumuskan tujuan yang akan dicapai kurikulum, perumusan persyaratan masuk, perumusan perkuliahan (courses) yang akan ditawarkan serta usul nama-nama pakar yang diharapkan akan bertanggung jawab dalam mengembangkan masing-masing perkuliahan. Pekerjaan ini dilakukan dalam suatu tim sehingga diharapkan pemikiran terbaik dari setiap orang bertemu dalam suatu keutuhan terbaik.

Proses selanjutnya adalah pengembangan silabus untuk setiap perkuliahan yang di UT dinamakan dengan istilah Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP). Biasanya, kegiatan ini dilakukan beberapa waktu setelah kegiatan pengembangan kurikulum selesai. Masa antara kedua kegiatan tersebut digunakan pimpinan FKIP-UT beserta stafnya untuk melihat dan mereview draft kurikulum yang telah dihasilkan serta nama-nama calon penulis GBPP yang diusulkan. Tolok ukur (kriteria) yang digunakan untuk meriview draft kurikulum tersebut adalah keselarasan antara draft kurikulum dengan ide pokok yang dijadikan landasan pengembangan kurikulum. Apabila draft kurikulum tersebut sudah dianggap sesuai, kegiatan berikutnya adalah menelaah nama-nama calon pengembang silabus yang diajukan.

Setelah proses ini dianggap selesai, barulah FKIP-UT mengundang para pakar calon penulis silabus. Mereka ini pada umumnya adalah juga calon penulis modul. Dalam suatu kegiatan lokakarya (workshop) para pakar tersebut mengembangkan silabus. Silabus tersebut pada dasarnya adalah pokok-pokok bahasan yang akan dikembangkan lebih lanjut dalam buku modul. Dalam pengembangan silabus ini FKIP-UT memiliki patokan bahwa 1 Satuan Kredit Semester (SKS) sama nilainya dengan satu buku modul yang tebalnya sekitar 50 - 60 halaman untuk perkuliahan bidang studi di luar matematika dan sekitar 30 halaman untuk bidang studi matematika.

Setelah silabus berhasil dikembangkan, para penulis silabus tersebut bekerja menulis modul di rumah masing-masing. Sewaktu-waktu FKIP-UT mengundang mereka dalam suatu pertemuan yang maksudnya adalah untuk mengetahui kemajuan penulisan yang telah dicapai. Apabila penulisan telah selesai dan telah diterima FKIP-UT, diadakan pertemuan kembali dengan penulis. Pertemuan terakhir ini bertujuan untuk

memberikan kesempatan kepada penulis modul untuk melakukan review terakhir sebelum proses pencetakan modul.

Keterlibatan para pakar dari berbagai perguruan tinggi dalam proses pengembangan kurikulum UT memiliki beberapa keuntungan. Keuntungan pertama ialah UT memiliki kesempatan untuk memilih para pakar yang sudah terkenal dalam bidangnya. Dengan demikian, UT dapat menjaga mutu bahan pelajaran yang disajikan dalam modul. Hal ini sangat penting mengingat sistem kepegawaian yang berlaku di Indonesia dan usia UT yang masih muda. Dengan cara yang dilakukannya, usia yang muda tidak lagi menjadi penghambat atas keinginan UT untuk menjadi standar mutu bahan pelajaran perguruan tinggi di Indonesia. Maksud ini sudah menampakkan bentuknya. Banyak perguruan tinggi di Indonesia yang telah menggunakan modul UT sebagai buku teks.

Keuntungan kedua ialah biaya produksi modul relatif menjadi lebih murah dibandingkan jika UT memiliki staf sendiri yang menjadi penulis modul. Dengan cara yang telah dilakukannya, UT tidak perlu memikul biaya untuk waktu-waktu yang tidak produktif dari staf pengajar. Mereka dibayar berdasarkan hasil karya nyata yang telah mereka hasilkan.

Keuntungan ketiga ialah UT dalam posisi yang menguntungkan dalam menentukan modul-modul yang bermutu tanpa perlu kehilangan biaya yang tinggi. Dengan cara seperti yang dilakukan ini, UT senantiasa dapat memilih modul-modul yang baik dan tidak menerbitkan modul-modul yang dianggap tidak memenuhi persyaratan. Modul yang tidak memenuhi persyaratan, dalam pengertian mutu bahan, bahasa, cara penyajian, tidak dicetak dan tidak dipakai. UT kemudian dapat memilih penulis lain yang

dianggap lebih memenuhi syarat. Posisi yang demikian tentu saja sukar dimiliki kalau penulis modul itu adalah staf tetap UT.

Keuntungan lain yang dirasakan ialah para penulis modul itu secara tidak langsung menjadi pendukung eksistensi UT. Di tempat asal mereka bekerja, mereka menjadi orang yang mempromosikan UT tanpa perlu dibayar. Dengan demikian popularitas UT di kalangan perguruan tinggi terkemuka menjadi semakin baik. Keuntungan seperti ini tak dapat diukur dengan tolok ukur ekonomi tetapi sangat nyata.

Cara kerja menggunakan pakar dari perguruan tinggi lain sebagai penulis modul mempunyai satu kelemahan utama, yaitu UT tidak dapat langsung mengawasi proses penulisan modul tersebut. Waktu penulisan menjadi taruhan karena para pakar itu sendiri mempunyai kesibukan pula di tempat dimana dia bekerja. Oleh karena itu dalam beberapa kasus modul FKIP-UT terpaksa tidak dapat dicetak pada waktu yang telah ditentukan.

Setelah modul siap cetak, pengetikan draft untuk pencetakan dilakukan staf yang ada di UT. Mereka memang bekerja di UT sebagai tenaga tetap untuk pengetikan modul. Draft ketikan pertama dikoreksi oleh staf akademik FKIP-UT, dan apabila sudah dianggap bebas kesalahan tik barulah diberikan ke percetakan. Tanggung jawab pencetakan dan distribusi modul ke mahasiswa sudah berada di bawah tanggung jawab bagian Distribusi dan bukan lagi fakultas.

Prosedur kerja yang sama dengan penulisan modul dilakukan pula dalam mengembangkan tes untuk ujian akhir semester. Tenaga-tenaga pengajar dari berbagai perguruan tinggi yang ahli dalam bidang studi yang bersangkutan dan mempunyai ketrampilan dalam mengembangkan tes diundang dan diajak serta. Mereka diminta

untuk menuliskan soal-soal tes tersebut berdasarkan kisi-kisi yang telah ditetapkan FKIP-UT. Setelah penulisan selesai, FKIP-UT kemudian mengundang penulis modul untuk menelaah butir-butir soal yang telah dibuat, terutama melihat dari aspek validitas konten tes. Apabila telah ada persetujuan dari penulis modul, tes tersebut dikirimkan ke Pusat Pengujian UT untuk diperbanyak, digunakan dalam ujian akhir semester, diolah, dan dilakukan "item analysis". Pengumuman hasil ujian dilakukan oleh Pusat Pengujian setelah hasil ujian tersebut mendapatkan persetujuan dari FKIP-UT. Dengan perkataan lain, tanggung jawab terhadap hasil ujian tetap berada di FKIP-UT tetapi teknis pelaksanaan pengujian dan pengumuman hasilnya dilakukan oleh Pusat Pengujian.

FKIP-UT menggunakan modul sebagai media pengajaran didasarkan atas beberapa pemikiran. Dengan karakteristik UT yang bersifat terbuka, mahasiswa belajar secara mandiri. Ini merupakan modal utama yang diharapkan oleh UT. Kediaman mahasiswa yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia menghendaki persyaratan yang demikian dalam belajar. Tanpa kemampuan belajar mandiri ini sukar mereka akan berhasil karena mereka tidak akan mendapatkan bantuan yang seperti diperoleh mahasiswa perguruan tinggi tradisional. Tidak ada dosen dan tidak ada jadwal perkuliahan yang tersedia seperti di perguruan tinggi tradisional.

Disamping itu disadari pula bahwa kecepatan belajar setiap orang berbeda. Konsep "mastery learning" yang dikembangkan Bloom dan beberapa tokoh pendidikan Amerika Serikat lainnya merupakan sesuatu alternatif yang cukup kuat untuk mengatasi adanya perbedaan kecepatan belajar tersebut. Di sekolah seringkali kenyataan ini diabaikan, demikian pula diperguruan tinggi tradisional sehingga peserta didik dinilai dari berapa banyak pengetahuan yang telah diperolehnya berdasarkan waktu

tertentu. Setiap peserta didik diajak bersaing untuk menguasai pengetahuan tertentu dalam waktu tertentu pula. Tidak demikian halnya dengan pandangan yang dianut UT. UT menghendaki para mahasiswanya menyadari kemampuan, dalam pengertian kecepatan belajar, yang mereka miliki dan kemudian belajar berdasarkan kemampuan itu. Oleh karena itu UT menjadikan waktu belajar menjadi variabel tetapi tingkat penguasaan materi pelajaran yang dijadikan patokan.

Waktu untuk penyelesaian penguasaan yang diperlukan diserahkan kepada mahasiswa. Oleh karena itu mereka tidak diwajibkan ujian pada waktu yang bersamaan dengan rekannya yang lain. Mereka menempuh ujian apabila mereka merasa telah siap. Kesiapan ini harus mereka nyatakan dengan pendaftaran ujian yang harus mereka lakukan.

Meskipun demikian, kecepatan belajar ini tidak sepenuhnya berada di tangan mahasiswa. Kebebasan yang diberikan dalam menentukan kecepatan belajar itu harus pula ada batasnya. Kalau tidak, pendidikan yang mereka tempuh menjadi sesuatu yang tidak beraturan sama sekali. Kebebasan mereka dalam menentukan kecepatan belajar harus ada batasnya. UT menentukan batas tersebut yang dilakukan dengan cara membatasi kesempatan ujian gratis yang menjadi hak mahasiswa tersebut. Mereka diberi hak menempuh ujian gratis satu tahun setelah mereka registrasi untuk suatu periode belajar tertentu. Dalam bahasa praktis, mereka sudah harus ujian pada kesempatan ujian kedua. Apabila mereka masih tetap belum mau ujian pada kesempatan tersebut diperbolehkan tetapi mereka diharuskan membayar uang ujian. Dengan cara demikian, mahasiswa tidaklah belajar tanpa kendali tetapi justru mereka diberi tanggung jawab dalam proses belajar.

KERJASAMA UT DENGAN LEMBAGA LAINNYA

Sistem kerja yang dilaksanakan di UT dimana FKIP termasuk didalamnya menghendaki adanya kerjasama yang baik dengan lembaga/instansi lain di luar UT. Prosedur pengembangan kurikulum dan bahan belajar seperti yang dikemukakan di bagian terdahulu hanya mungkin terjadi karena adanya kerjasama UT dengan perguruan tinggi negeri lainnya. Hanya dengan adanya kerjasama tersebut, perguruan tinggi lainnya dengan mudah dapat mengizinkan tenaga pengajarnya untuk mengikuti kegiatan yang dilakukan FKIP-UT dan fakultas lainnya.

Kerjasama dengan perguruan tinggi negeri lainnya terlihat pula dalam pembinaan Unit Pelayanan Belajar Jarak Jauh (UPBJJ). Di seluruh Indonesia terdapat 32 UPBJJ. Dikepalai oleh seorang dosen senior yang diambil dari perguruan tinggi dimana UPBJJ tersebut berada, kerjasama dengan perguruan tinggi lainnya itupun terlihat pula dari kantor UPBJJ yang disediakan oleh perguruan tinggi negeri yang bersangkutan. Lagipula, dalam sistem jaringan kerja UT, rektor dari perguruan tinggi negeri di kota dimana UPBJJ tersebut berada juga menjadi pembina UPBJJ.

Selain dengan perguruan tinggi negeri, UT juga mengadakan kerjasama dengan instansi lainnya, diantaranya yang menonjol ialah kerjasama dengan PERUM POS. Kerjasama ini terbina sejak awal berdirinya UT terutama untuk kelancaran pendaftaran mahasiswa dan pengiriman bahan belajar. Berdasarkan kerjasama ini di seluruh Indonesia terdapat 207 kantor pos yang melayani penjualan formulir dan pengumuman hasil ujian UT.

UT juga melakukan kerjasama dengan toko buku dalam menjualkan modul-modul UT. Kerjasama utama dilakukan dengan toko buku GRAMEDIA. Disamping itu

penjualan modul UT dilakukan pula di beberapa toko kecil yang tersebar di berbagai tempat selain di UPBJJ. Dengan kerjasama seperti ini, UT mengharapkan agar mahasiswa UT dan peminat lainnya dengan mudah dapat membeli modul yang diinginkan.

Kerjasama lain dilakukan pula dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjendikdasmen) dan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS) wilayah Khusus Ibukota Jakarta. Kerjasama dengan Ditjendikdasmen dilakukan tidak hanya pada tingkat pusat tetapi juga lembaga di bawahnya seperti Pusat Penataran Guru Tertulis di Bandung. Sifat kerjasama ini adalah standardisasi program PGSMTP Tertulis yang dikelola oleh lembaga tersebut. Kerjasama dengan KOPERTIS Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah dalam standardisasi mutu perguruan tinggi swasta. Pada saat sekarang kerjasama itu ditandai dengan ujian negara bagi perguruan tinggi swasta dalam perkuliahan yang bersifat umum.

DAFTAR BACAAN

- Brookfield, S.D. (1986), Understanding adult learning. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
- Campbell, D.D. (1977), Adult education as a field of study and practice. Vancouver: The Centre for Continuing Education.
- Hasan, S.H. (1979), Pendidikan guru di Indonesia. KOMPAS.
- Lunardi, A.G. (1986), Pendidikan orang dewasa. Jakarta: PT Gramedia.
- Universitas Terbuka (1987), Katalog 1987. Jakarta : UT
- Wiriaatmadja, R. (1986), Penelitian evaluasi pelaksanaan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa di SMA Negeri Bandung. Bandung: Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan.